

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.1 Latar belakang

Dengan dilaksanakan Otonomi daerah berdasarkan undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008, dimana Kabupaten dan Kota memiliki Otonomi yang luas dan disesuaikan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi pemekaran urusan otonomi daerah yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor/Depatemen/Instansi vertical di daerah. Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendaya gunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip – prinsip Good Governance, selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh– sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Publik Good and Service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban

instansi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai sebagai pelaksana urusan bidang komunikasi dan informatika, mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan inilah, maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai tahun 2024 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip – prinsip *Good Governance*, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *Public Good and Service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024 serta memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen dengan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih focus, efektif, efesien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.3. GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Binjai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai diatur dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai yang menyebutkan merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan penyediaan informasi.

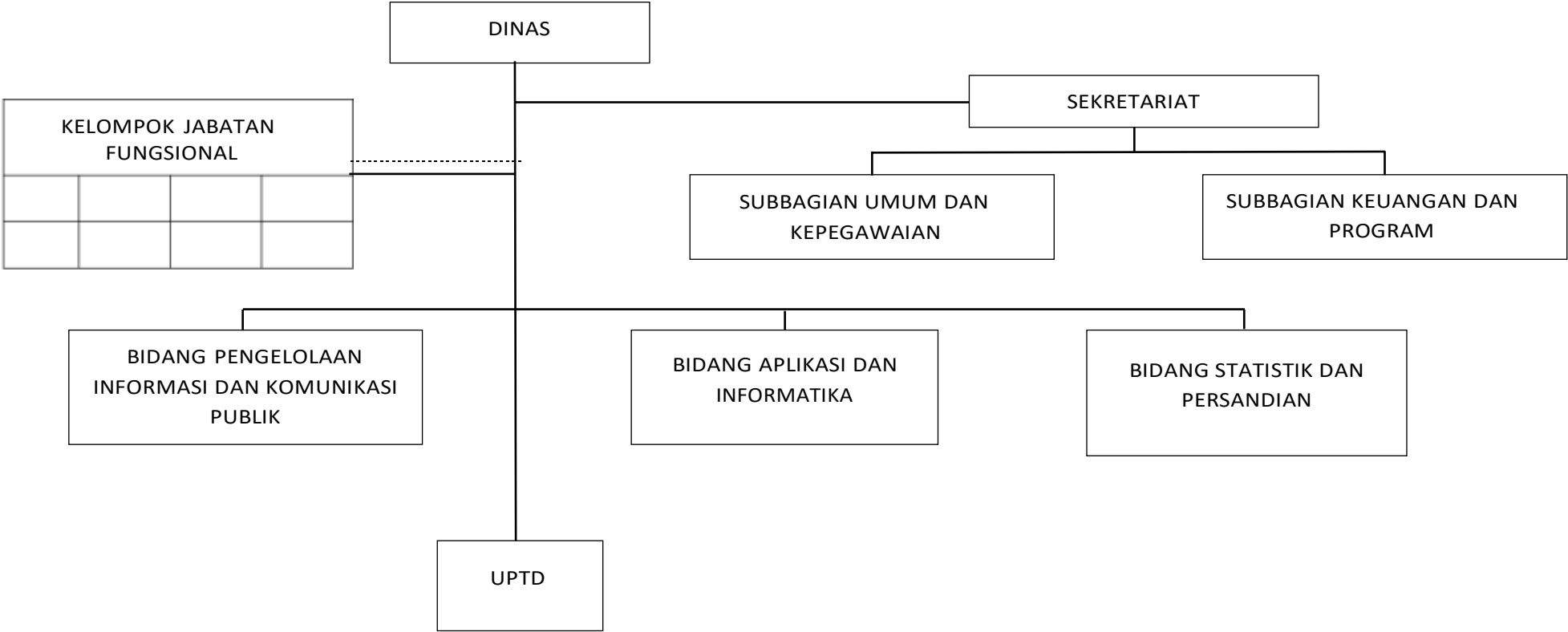
1.4. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program;
3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika
5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 1.1.BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI –
TIPE B

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA
BINJAI NOMOR 19
TAHUN 2023 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



1.5. SUMBER DAYA APARATUR

Sampai dengan 31 Desember 2024 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai berjumlah 19 orang ASN, 36 orang Tenaga Harian Lepas dan 8 Tenaga Programmer. (Kontrak). Komposisi ketenagaan dijabarkan sebagai berikut;

1. Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024

Gol/Ruang	Jumlah
IV/a	1
IV/b	3
IV/c	-
IV/d	-
IV/e	-
Total	4
III/a	0
III/b	2
III/c	4
III/d	8
Total	14
II/a	-
II/b	-
II/c	1
II/d	-
Total	1
I/a	-
I/b	-
I/c	-
I/d	-
Total	0
Grand Total	19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Berdasarkan tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai berdasarkan golongan/ruang Mayoritas Golongan/Ruang III sebanyak 14 orang.

Tabel 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Tenaga Harian Lepas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024

Nama Jabatan	Jumlah
Staff Administrasi	14
Tenaga Liputan	22
Tenaga Operator BCC	12
Tenaga Programmer	8
Total	56

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Dari tabel diatas, pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai memiliki 56 (lima puluh enam) orang tenaga NON ASN, untuk membantu kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenis Kelamin	Jenis Pegawai		Jumlah
	ASN	Non ASN	
Laki – Laki	9	25	34
Perempuan	10	31	41
Total	19	56	75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Dari tabel diatas dapat disampaikan pada tahun 2024 jumlah sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai lebih banyak berjenis perempuan dibanding laki-laki, yaitu laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan sebanyak 41 orang.

3. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.4. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Jenis Pendidikan	Jenis Pegawai		Jumlah
	ASN	Non ASN	
SMA	-	20	20
D3	1	3	4
S1/D4	12	33	45
S2	6	-	6
Total	19	56	75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari tabel diatas dapat disampaikan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai memiliki jumlah sumber daya aparatur paling banyak memiliki latar pendidikan S1 yaitu sebanyak 45 orang.

4. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.5. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Jenis Jabatan	Jumlah
Eselon 2/ Kepala Dinas	1
Eselon 3/ Kepala Bidang	4
Eselon 4/ Kasubbag	2
Jabatan Fungsional	5
Jabatan Pelaksana	8
Tenaga Administrasi	14
Tenaga Peliputan	22
Tenaga Operator	12
Tenaga Programmer	8
Total	75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

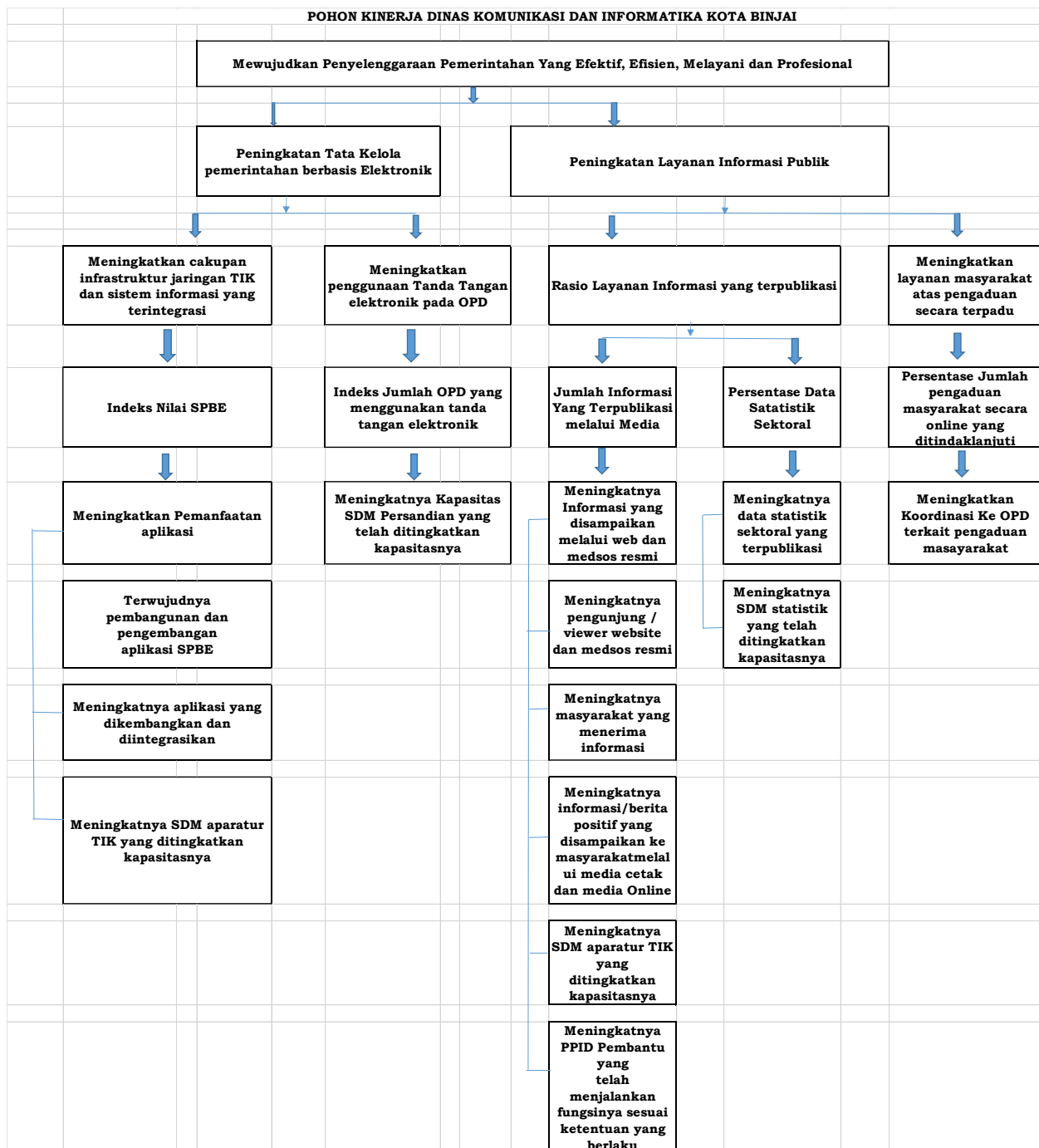
Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika hanya memiliki 5 (lima) orang untuk menduduki pejabat fungsional, sementara berdasarkan

struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai membutuhkan 9 (sembilan) orang sumber daya untuk menduduki pejabat fungsional. Ada kekurangan 4 (empat) orang tenaga fungsional untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

B. Cascading Kinerja dan Cross Cutting Kinerja

1. Cascading/ Pohon Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kota Binjai, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021 – 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dibentuk dengan skema/Cascading/ Pohon Kinerja sebagai berikut :



2. Crosscutting

Cross Cutting adalah penjabaran dari instansi atau OPD mana saja yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program kerjanya. Cross cutting Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2023, tertuang pada tabel berikut ini :

Tujuan	: Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK, layanan informasi publik, tanggapan pengaduan masyarakat, penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada OPD, dan penyusunan peraturan-peraturan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi						
Sasaran	: Meningkatkan pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, akses dan kualitas layanan publik, dan meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan kinerja dan keuangan						
Urusan	: KOMUNIKASI dan INFORMATIKA						
	Permasalahan Umum :	Permasalahan Pokok :					
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI RENIA TERHADAP DPA/DPPA	LINKAGE PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Titik Hot Spot di Ruang Publik	58	55	45	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	Dikarenakan Keterbatasan Anggaran, Anggaran Untuk Tahun 2024 Indikator pada Kinerja ini tidak ditampung
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Informasi Publik Yang Terpublikasi	1135	1000	1120	Program diakomodir di dalam DPA, 1 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	PEMKO BINJAI DAN SELURUH OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai	50%	38%	75%	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	SELURUH OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Kunjungan Masyarakat di Website Pemerintah Kota Binjai	19345	18250	50703	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Berbasis Elektronik yang Dikelola	12	11	13	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	SELURUH OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah ruang publik yang tercover pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK	80%	70%	80%	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	BAGIAN HUKUM
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi yang terintegrasi Tahun (n) dikurang Jumlah aplikasi yang terintegrasi	70%	60%	70%	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	SELURUH OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah peraturan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diselesaikan	3	2	3	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	PEMKO BINJAI
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Layanan Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan	70%	60%	69%	Program diakomodir di dalam DPA, 1 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	PEMKO BINJAI
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah informasi yang diupload di website Pemkot Binjai	70%	65%	70%	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	PEMKO BINJAI
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah informasi yang diupload di Website Diskominfo	70%	60%	70%	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	PEMKO BINJAI
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah informasi yang diupload di media sosial Pemkot Binjai dan Diskominfo	60%	50%	55%	Program diakomodir di dalam DPA, 1 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	PEMKO BINJAI
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti	70%	60%	98%	Program diakomodir di dalam DPA, 1 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	SELURUH OPD
Tujuan	: Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK, layanan informasi publik, tanggapan pengaduan masyarakat, penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada OPD, dan penyusunan peraturan-peraturan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi						
Sasaran	: Meningkatkan pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, akses dan kualitas layanan publik, dan meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan kinerja dan keuangan						
Urusan	: STATISTIK						
	Permasalahan Umum :	Permasalahan Pokok :					
	Belum disusunnya Perwal terkait Wali Data	Belum terlaksananya fungsi Statistik sebagai Wali Data					
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI RENIA TERHADAP DPA/DPPA	LINKAGE PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah data statistik sektoral dibagi jumlah data statistik sektoral	65%	40%	0%	Bidang Urusan Statistik dan Persandian Baru disahkan pada Bulan Mei 2023 hingga Anggaran Bidang tersebut belum ditampung pada 2023	
Tujuan	: Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK, layanan informasi publik, tanggapan pengaduan masyarakat, penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada OPD, dan penyusunan peraturan-peraturan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi						
Sasaran	: Meningkatkan pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, akses dan kualitas layanan publik, dan meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan kinerja dan keuangan						
Urusan	: PERSANDIAN						
	Permasalahan Umum :	Permasalahan Pokok :					
	Belum disusunnya Perwal terkait TIK dan TTE	Belum terlaksananya pelaksanaan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE)					
	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI RENIA TERHADAP DPA/DPPA	LINKAGE PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Layanan Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan	70%	60%	69%	Program diakomodir di dalam DPA, 1 kegiatan sudah diakomodir di DPA dan 5 sub kegiatan yang sudah diakomodir.	PEMKO BINJAI

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Secara spesifik permasalahan strategis yang dihadapi Dinas

Komunikasi dan Informatika Binjai pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Rasio Jumlah Ruang Publik Yang tercakup infrastruktur jaringan TIK pada Tahun 2024 tidak diakomodir Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dikarenakan keterbatasan pagu anggaran dan prioritas kegiatan.
2. Indikator Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi masih belum mencapai 100% dikarenakan adanya aplikasi milik Pemerintah Pusat/Kementrian memiliki database yang berbeda dengan aplikasi yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Kota Binjai.
3. Indikator Rasio Jumlah OPD yang menggunakan Tanda Tangan elektronik masih 7% karena belum tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Rasio Jumlah Layanan Informasi, dengan keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024 telah maksimal memanfaatkan media.
5. Rasio Jumlah layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti masih belum 100% dikarenakan masih adanya bebarapa OPD yang belum menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke dalam aplikasi E-MASYARAKAT dan SP4N Lapor.
6. Masih belum tersedianya sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika urusan Statistik dan Persandian yang bersertifikasi.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai

penanggung jawab dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (outcome) yang dicapai yaitu ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program atau indikator keluaran (output) yaitu ukuran barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf untuk menentukan strategi masa depan organisasi. Penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai memiliki sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis serta Penetapan Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang

bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BAB IV Penutup

Pada sub bab ini diuraikan kesimpulan umum atau capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

I. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai yang akan menjadi gambaran kondisi pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius.”

Adapun maksud dari isi tersebut adalah pembangunan dalam memacu kemajuan kota binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Maju mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Berbudaya mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai- nilai dan norma norma kearifan local dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negative globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan

karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertolorensi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.

3. Religius mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersmaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Adapun dari Visi yang ada dituangkan menjadi 3 (tiga) misi yaitu :

1. Misi 1, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan system kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing – masing.
2. Misi 2 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup..

3. Misi 3 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas. Misi ini merupakan upaya pemerintah daerah sesuai kewenangan dan sumber daya tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, maka tujuan yang akan dicapai adalah : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien. Melayani dan Profesional”, melalui pencapaian sasaran utama/strategis peningkatat tata kelola pemerintahan pada tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Nilai SPBE diatas 2,98 pada tahun 2024
2. Meningkatkan Persentase Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik menjadi 15% pada tahun 2024
3. Meningkatkan Jumlah Informasi Publik yang terpublikasi melalui Media diatas 1100 informasi pada Tahun 2024
4. Meningkatkan persentase data statistik diatas 15% pada tahun 2024.
5. Memenuhi persentase jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti diatas 70% pada tahun 2024.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Adapun yang menjadi sasaran adalah :

1. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi yang terintegrasi melalui peningkatan Indeks Nilai SPBE pada tahun 2024.
2. Meningkatkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada OPD melalui peningkatan persentase jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik pada tahun 2024.
3. Meningkatkan Rasio Layanan Informasi yang terepublikasi melalui Jumlah Informasi Publik yang terpublikasi melalui Media serta persentase data statistik sektoral yang disusun pada Tahun 2024.
4. Meningkatkan layanan masyarakat atas pengaduan secara terpadu melalui peningkatan persentase jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti pada tahun 2024.

3. Sasaran Strategis

Guna memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja, tujuan strategis dijabarkan menjadi dua sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1 :
SASARAN STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
TAHUN 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2024
1	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis Elektronik	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi yang terintegrasi	Indeks Nilai SPBE	2,98
		Meningkatkan penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD	Persentase Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik	15%
2	Peningkatan Layanan Informasi Publik	Rasio Layanan Informasi yang terpublikasi	Indeks Layanan Informasi Publik yang dipublikasikan	70%
			Indeks data statistik yang tersusun	45%
		Meningkatkan layanan masyarakat atas pengaduan secara terpadu	Indeks Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti	70%

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Target Dinas Komunikasi dan Informatika yang hendak dicapai pada tahun 2024 merupakan target seperti yang tercantum dalam Dokumen Rancana Strategis (Renstra) 2021-2026 Revisi I Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

C. Indikator Kinerja

I. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai setiap Tahun Anggaran, menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai di awal Tahun Anggaran. Berkenaan dengan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Nomor 000.8.6.3/2822/ Dinkes / IV / 2024 tanggal 03 Juni 2024 (Lampiran 1) maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN (RUMUS PERHITUNGAN IKU)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi yang terintegrasi	Indeks Nilai SPBE	DISKOMINFO	RENSTRA	
2	Meningkatkan penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD	Persentase Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik	DISKOMINFO	RENSTRA	Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik dibagi jumlah OPD dikali 100%
3	Rasio Layanan Informasi yang terpublikasi	Jumlah Informasi Yang Terpublikasi melalui Media	DISKOMINFO	RENSTRA	Jumlah Layanan Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan
		Persentase Data Statistik Sektoral Tersusun	DISKOMINFO	RENSTRA	Jumlah data statistik sektoral dibagi jumlah data statistik sektoral yang seharusnya dikali 100%
4	Meningkatkan layanan masyarakat atas pengaduan secara terpadu	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti	DISKOMINFO	RENSTRA	Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

D. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024 terdiri dari Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Masing-masing sasaran memiliki beberapa indikator kinerja.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024 :

TABEL 2.3.
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
1	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi yang terintegrasi	Indeks Nilai SPBE	2,98
2	Meningkatkan penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD	Persentas Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik	15%
3	Rasio Layanan Informasi yang terpublikasi	Jumlah Informasi Publik yang terpublikasi melalui Media	1100
		Persentase data statistik sektoral dibagi jumlah data statistik sektoral	15%
4	Meningkatkan layanan masyarakat atas pengaduan secara terpadu	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti	70%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah RKA tahun 2024, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut :

TABEL 2.4 :
ANGGARAN DAN PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BINJAI TAHUN 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.620.028.407	DAU
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 2.227.422.546	DAU
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 2.191.822.276	DAU
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 151.320.630	DAU
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 217.173.100	DAU
JUMLAH		Rp 9.407.766.959	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024

Dari tabel diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai memiliki anggaran Rp. 9,407,766,959.00 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Binjai menyusun LKIP Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun 2024 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Binjai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 maupun Renja Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun 2024.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran

tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretaris Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi yang terintegrasi	Indeks Nilai SPBE	2,98	3,12

2	Meningkatkan penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD	Persentase Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik	15%	12%
3	Rasio Layanan Informasi yang terpublikasi	Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan	1100	4225
		Persentase data statistik sektoral yang tersusun	15%	30%
4	Meningkatkan layanan masyarakat atas pengaduan secara terpadu	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti	70%	94%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

1. Analisis Sasaran Strategi 1: Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi yang terintegrasi.

Capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi yang terintegrasi” adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 106%.

- ❖ Target Nilai Indikator kinerja Rasio Jumlah Ruang Publik Yang tercakup infrastruktur jaringan TIK dalam hal ini adalah terkait Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana pada Tahun 2024 Indeks SPBE Kota Binjai mendapatkan nilai 3,12 dari target 2,98, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinyatakan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE diperlukan tata kelola dan manajemen SPBE, dimana dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan sehingga di perlukan good governance terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Berikut Aspek penilaian sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik yang ditetapkan Menteri PANRB.

Tabel . 3.3
ASPEK PENILAIAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)

NO	DOMAIN DAN ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
	Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
2	Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
	Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
	Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
	Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
3	Domain 3 - Manajemen SPBE	16,50%
	Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
	Aspek 6 - Audit TIK	4,50%
4	Domain 4 - Layanan SPBE	45,50%
	Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50%
	Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Sumber : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Ada 4 (empat) Domain Utama yang menjadi dasar penentuan nilai SPBE, yaitu (1) Domain Kebijakan SPBE yang terdiri dari aspek kebijakan tata kelola SPBE, (2) Domain Tata Kelola SPBE yang terdiri dari aspek Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, (3) Domain Manajemen SPBE yang terdiri dari aspek Penerapan Manajemen dan Audit TIK dan (4) Domain Layanan SPBE yang terdiri dari aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik.

Adapun penentuan predikat dalam pencapaian nilai Indeks adalah sebagai berikut :

TABEL 3.4
PREDIKAT INDEKS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3	2,6 - <3,5	Baik
4	1,8 < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai menjadi leading sektor untuk pencapaian indeks capaian SPBE , dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan koordinasi kepada opd-opd yang ada di kota Binjai. Berikut Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Binjai pada Tahun 2023 dan 2024.

TABEL. 3.5
CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH KOTA BINJAI

NO	DOMAIN DAN ASPEK PENILAIAN	2023	2024
1	Domain 1 - Kebijakan SPBE	3	3,30
	Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3	3,30
2	Domain 2 - Tata Kelola SPBE	2,9	2,80
	Aspek 2 - Perencanaan Strategis	2,75	2,50
	Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	3

	Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	3	3
3	Domain 3 - Manajemen SPBE	1,09	1,73
	Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	1,13	2
	Aspek 6 - Audit TIK	1	1
4	Domain 4 - Layanan SPBE	3,69	3,75
	Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,6	3,8
	Aspek 8 - Layanan Publik	3,83	3,67
NILAI SPBE		2,98	3,12

Sumber : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Pencapaian Indeks SPBE Pemerintah Kota Binjai pada Tahun 2024 yang diputuskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kota Binjai mendapat predikat **“Baik”** dengan Capaian Indeks Rata-rata sebesar 3,12 Terjadi peningkatan predikat dibanding Tahun 2023, dimana Pemerintah Kota Binjai mendapat predikat **“Baik”** dengan nilai indeks rata-rata 2,98.

Aturan terkait Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah di diterbitkan Keputusan Walikota Binjai Nomor. 188.45-483/K/Tahun 2024 Tentang “Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” yang ditandatangani di Binjai pada tanggal 14 Juli 2023.

Dalam mencapai target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai juga merekrut Tenaga Ahli Programmer sebagai tenaga pendamping berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-843/K/Tahun 2024 untuk mendampingi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membangun serta melakukan integrasi aplikasi yang ada di Kota Binjai.

Dasar pertimbangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Binjai merekrut tenaga programmer non ASN dengan pembagian jabatan tugas sebagai Leader, senior Programmer dan Junior Programmer, dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Binjai tidak memiliki Sumber Daya Aparatur ASN yang memiliki latar belakang pendidikan pemrograman atau kemampuan untuk membangun aplikasi.

Berikut jumlah tenaga programmer yang di rekrut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

Tabel 3.6
Tenaga Programmer Dinas Komunikasi Informatika Kota
Binjai
Tahun 2024

No.	Jabatan Tenaga Pendamping	Jabatan Dalam Tim	Jumlah
1	Leader	Programmer	1 Orang
2	Senior Programmer	Programmer	4 Orang
3	Junior Programmer	Programmer	3 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Binjai merekrut Tenaga Programmer sebanyak 9 (orang) dengan dibaagi menjadi 3 (tiga) kategori posisi, yaitu :

1. Leader berjumlah 1 (satu) orang
2. Senior Programmer berjumlah 4 (empat) orang
3. Junior Programmer berjumlah 3 (tiga) orang

Pada pelaksanaan tugasnya Tenaga Programmer bertugas :

- a. membantu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk mendukung penyelenggaraan Binjai *Smart City* dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu :

1. melakukan *create* subdomain dari domain binjaikota.go.id dan *host* terkait aplikasi-aplikasi sesuai kebutuhan;
 2. melakukan estimasi *server* yang dibutuhkan sesuai dengan peruntukannya;
 3. melakukan instalasi *server* dan konfigurasi database;
 4. melakukan pemeliharaan aplikasi yang telah ada;
 5. mengembangkan aplikasi yang telah ada;
 6. merancang dan membangun aplikasi-aplikasi baru sesuai kebutuhan;
 7. melakukan monitoring, pemeliharaan, *backup*, *update* dan *upgrade server* dan jaringan;
 8. mengelola dan menjaga kerahasiaan *password* seluruh aplikasi pemerintah daerah;
- b. melaporkan hasil laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan setiap bulan kepada Wali Kota.

Tahun 2024, Tenaga Programmer telah membangun 3 (tiga) aplikasi dan 34 (tiga puluh empat) website opd-opd yang ada di Kota Binjai serta melakukan pengembangan-pengembangan (updating) kepada aplikasi yang telah dibangun sejak tahun 2021.

TABEL 3.7
PENGEMBANGAN APLIKASI KOTA BINJAI
TAHUN 2024

No	Aplikasi/ website	Tahun	Status	Integrasi
A	Aplikasi			
1	e- Dokter	2017	Tidak aktif	-
2	e- Perizinan	2017	Masih Aktif	-
3	e- Musrenbang	2017	Tidak aktif	-
4	e- Mas	2017	Aktif	Terintegrasi dengan Binjai Satu Aplikasi

5	e- Ra	2017	Tidak aktif	-
6	e- SSH	2017	Tidak aktif	-
7	e- SDM	2017	Tidak aktif	-
8	PPDB Online	2018-2024	Aktif	-
9	e- Tourism	2023	Aktif	-
10	e- PMKS	2018	Tidak Aktif	-
11	e- TPP	2018	Tidak Aktif	-
12	e- Aset	2018	Tidak aktif	-
13	Saber	2019	Aktif	-
14	Sicuti	2019	Aktif	-
15	e- Catin	2019	Aktif	-
16	e- Office Kominfo	2019	Tidak aktif	-
17	Sidadu IKM	2019	Tidak aktif	-
18	Sidik	2019	Tidak aktif	-
19	e- Dukcapil	2019	Tidak aktif	-
20	Simparda	2019	Aktif	-
21	e- BPHTB	2019	Aktif	-
22	e- Saberling	2019	Tidak Aktif	-
23	e- Dasawisma	2019-2024	Aktif (Berubah nama menjadi kerabatbinjai pada tahun 2022)	-
24	Covid- 19	2020	Tidak aktif	-

25	Satgas Covid	2020	Tidak aktif	-
26	Desk Pilkada	2020	Tidak aktif	-
27	Sigum	2020	Tidak aktif	-
28	Pakjai	2020	Tidak aktif	-
29	JDIH	2021-2024	Aktif	Terintegrasi dengan jdihin
30	Simpeg	2021	Aktif	-
31	Binjai Satu Aplikasi	2022	Aktif	Terintegrasi dengan emas, ambulance, ambulance psc, ekelurahan
32	e- Ambulance	2022	Aktif	Teringrasi dengan binjai satu aplikasi
33	e- Masyarakat	2022	Aktif	Teringrasi dengan binjai satu aplikasi
34	e- Kelurahan	2022	Aktif	Teringrasi dengan binjai satu aplikasi
35	Dokter Ambulance	2022	Aktif	Teringrasi dengan binjai satu aplikasi
36	Ambulance PSC	2022	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
37	WBS	2022	Aktif	-
38	ILA	2022	Tidak Aktif	-
39	SIBUSER	2022	Aktif	Terintegrasi dengan kemenaker
40	Aplikasi Pimpinan	2022	Aktif	-
41	SIOLAH	2024	Belum Publish	-
42	BNN	2024	Aktif	-
43	SIPEDAS	2024	Belum Publish	-

44	Penghargaan	2024	Belum Publish	-
----	-------------	------	---------------	---

Sumber : Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Dari tabel diatas dapat disampaikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, tim programmer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai telah membangun 44 Aplikasi yang dibangun sesuai permintaan dari opd-opd yang ada di Kota Binjai.

Ada satu aplikasi “Binjai Satu Aplikasi” yang telah dibangun oleh Tim Programmer dimana pada Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk mengintegrasikan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, serta mengintegrasikan Website Pemerintah Kota Binjai dengan website opd-opd Pemerintah Kota Binjai.

Pada tahun 2024, Programmer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai telah membangun Aplikasi baru yaitu : SIOLAH, SIPEDAS dan Penghargaan yang direncanakan akan di publish pada tahun 2025.

Selain membangun dan mengembangkan aplikasi, tenaga Programmer juga melakukan updating Website-website OPD yang telah dibangun pada tahun 2023.

TABEL 3. 8
DATA WEBSITE YANG DIBANGUN TENAGA PROGRAMMER
TAHUN 2024

II	WEBSITE			
1	Website Puskesmas Tanah Tinggi	2024	Aktif	-
2	Website Kelurahan Sukaramai	2024	Aktif	-
3	Sekretariat DPRD Kota Binjai	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
4	Inspektorat Daerah kota	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi

	Binjai			
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
6	Dinas PUPR	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
9	SATPOL PP	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
10	Dinas Sosial	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Masyarakat	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
13	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
14	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
15	Dinas Perhubungan	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
16	Dinas Komunikasi & Informatika	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi

	Terpadu Satu Pintu			
18	Dinas Perpustakaan	2023	Aktif	-
19	Dinas Pariwisata	2023	Aktif	-
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
22	Kecamatan Binjai Kota	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
23	Kecamatan Binjai Utara	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
24	Kecamatan Binjai Selatan	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
25	Kecamatan Binjai Barat	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
26	Kecamatan Binjai Timur	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
27	Bagian Umum Setdako Binjai	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
28	Bagian Pemerintahan Kota Binja	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
29	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setdako Binjai	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
30	Bagian Hukum Setdako Binjai	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
31	Bagian Organisasi Setdako Binjai	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Binjai	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
33	Bagian Perekonomian Setdako Binjai	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi
34	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai	2023	Aktif	Terintegrasi dengan binjai satu aplikasi

Selain membangun aplikasi-aplikasi lokal Pemerintah Kota Binjai, Tim Programmer juga pada Tahun 2023 juga membangun website opd-opd Pemerintah Kota Binjai. Ada 34 website OPD yang telah dibangun dan website-website tersebut telah terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai. Dan pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika kota Binjai melakukan pengembangan kepada website opd yang telah dibangun.

2. Analisis Sasaran Strategi 2: Meningkatkan Penggunaan Tanda Tangan elektronik

Target Nilai Indikator kinerja Meningkatkan penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD dengan realisasi target sebesar 12%, capaian tersebut lebih kecil dibanding target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja tidak tercapai pada tahun 2024 dengan target yang ditetapkan 15%.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Binjai ada 5 (lima) OPD dari 40 (empat puluh) OPD yang telah memanfaatkan tanda tangan elektronik dalam melakukan proses administrasi khususnya administrasi untuk surat keluar yaitu : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai, Dinas Perpustakaan Kota Binjai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu.

Tanda Tangan Elektronik atau TTE adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi secara digital yang menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsrE) Indonesia yang diakui Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Tidak tercapainya/terlaksananya Sasaran Strategis ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika belum urusan pengelolaan keamanan dan persandian serta sumber daya pada Bidang tersebut

dilantik bulan Juni 2024.

Pada pelaksanaannya, dengan kondisi tidak di ditampungnya anggaran penggunaan Tanda Tangan Eelektronik tersebut pada November 2024, Bidang pengelolaan Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai telah melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsrE) untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai terkait penggunaan tanda tangan elektronik.

Kesepakatan kerjasama tersebut rencananya akan direalisasikan pada tahun anggaran 2024.

3. Analisis Sasaran Strategi 4 : Meningkatkan Layanan informasi Publik

- ❖ Target Nilai Indikator Rasio Jumlah Layanan informasi realisasi target sebesar 1100 informasi sehingga capaian kinerja melebihi target dari yang ditentukan sebesar 4225 informasi pada tahun 2024.

Pelayanan informasi publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu Badan/Dinas Publik yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai yang memiliki tugas sebagai penyedia Layanan Informasi Publik dalam hal ini melakukan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang akan di akses publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai memanfaatkan berbagai media baik media cetak, media online, media televisi dan media sosial.

Untuk kebutuhan penyebaran informasi melalui media on line dan media cetak, pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama dengan beberapa penyedia media cetak (surat Kabar), penyedia portal media online dan Televisi.

TABEL 3.9
MEDIA PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
TAHUN 2024

NO	MEDIA	JUMLAH
1	MEDIA CETAK	6
2	MEDIA ON LINE	12
3	MEDIA TELEVISI	4
4	MEDIA SOSIAL (Instagram dan Facebook)	2
5	WEBSITE PEMERINTAH KOTA BINJAI	1
6	WEBSITE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI	1
7	WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH	1
JUMLAH MEDIA		27

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Ada sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Media Komunikasi yang dimanfaatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian kinerja untuk pemenuhan penyediaan layanan informasi yang akan diakses publik.

- Media Cetak adalah media yang memuat informasi dalam bentuk informasi cetak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai melakukan kerjasama dengan 6 (enam) media surat kabar/harian, yaitu Metro 24, Sumut Pos, Mimbar Umum, Waspada dan Tribun Medan
- Media Online adalah media yang memuat informasi dengan memanfaatkan jaringan internet, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai melakukan kerjasama dengan 12 (Dua Belas) Portal Media Online yaitu Katakabar.com, LKBN Antara, Axialnews, E-News.Id, Matatelinga, Waspada-online, Dirma, Analisaone.com, Sumut.id, AnalisaOnline, Axialnews.com dan Nonstop.
- Media Televisi adalah media elektronik audiovisual yang digunakan untuk menyajikan dan menyampaikan informasi kepada publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

melakukan kerjasama dengan TVRI, TVOne dan iNews dan Garuda TV.

- Untuk Media Sosial adalah media untuk bersosialisasi yang dilakukan secara online, Dinas Komunikasi Memanfaatkan Media Sosial Instagram (ID : dinaskominfokotabinjai) dan Facebook (ID : diskominfokotabinjai)
- Website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web (www), untuk website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai mengelola 3 (tiga) website www.diskominfo.binjaikota.go.id, www.binjaikota.go.id dan www.ppid.binjaikota.go.id sebagai salah satu media untuk penyebaran informasi.

TABEL 3.10
JUMLAH PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
TAHUN 2024

No	JENIS MEDIA	Jumlah Iklan/berita	
		2023	2024
1	Media Cetak	13	27
2	Media Online	756	769
3	Televisi	3	4
4	Radio	-	-
5	Sosial Media Instagram	798	947
6	Sosial Media Facebook	798	947
7	Website Pemerintah Kota Binjai	411	561

8	Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	411	561
9	Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah	156	135
10	Media Luar Ruang (Baliho dan Spanduk)	197	274
JUMLAH		3543	4225

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Dari tabel di atas secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah penyebaran informasi yang dapat diakses publik. Pada Tahun 2023 jumlah penyebaran informasi yang disediakan berjumlah 3346 informasi, sedangkan pada tahun 2024 berjumlah 4225 informasi melalui berbagai media; Media Cetak, Media Online, Media Televisi, Sosial Media (Instagram dan Facebook), Website Pemerintah kota Binjai, Website Dinas Komunikasi dan Informatika, Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah dan melalui Media Luar Ruang berupa Baliho dan Spanduk.

Dari tabel diatas terjadi penurunan jumlah informasi melalui media cetak namun ada peningkatan yang signifikan pada capaian untuk media online, hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai membuat kebijakan untuk lebih menitikberatkan penyebarluasan informasi melalui media online karena dinilai akan lebih cepat dan mudah untuk diakses publik dibanding melalui media cetak.

5. Analisis Sasaran Strategi 5 : Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat secara online yang ditindaklanjuti

- ❖ Target Nilai Indikator Rasio Jumlah layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti dengan realisasi 97% sehingga capaian kinerja melebihi target yang ditentukan sebesar 75% pada Tahun 2024.

Pada pelaksanaan pencapaian rasio jumlah layanan pengaduan masyarakat secara online, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Binjai mengelola aplikasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)- LAPOR yang disediakan oleh Kementrian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Aplikasi E-Masyarakat yang dibangun Dinas Komunikasi Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

Dimana kedua aplikasi ini merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik.

TABEL 3.11
RASIO JUMLAH LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT SECARA ONLINE
YANG DITINDAKLANJUTI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BINJAI TAHUN 2024

NO	APLIKASI	2024		
		JUMLAH PENGADUAN	SUDAH DITINDAKLANJUTI	BELUM DITINDAKLANJUTI
1	SP4N LAPOR	25	25	0
2	E-MASYARAKAT	37	35	2
TOTAL LAPORAN		62	60	2

Sumber : SP4N Lapor dan E-Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Berdasarkan tabel diatas untuk tahun 2024 target capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 94% dari keseluruhan pengaduan yang masuk, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah melebihi capaian rasio yang ditargetkan yaitu sebesar 97%, dari 62 pengaduan masyarakat yang masuk dalam aplikasi SP4N LAPOR dan E-MASYARAKAT, pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti Dinas/OPD terkait pengaduan masyarakat tersebut.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat masih ada 2 (dua) pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti Dinas/Opd terkait pengaduan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai telah melakukan koordinasi baik melalui

surat pemberitahuan maupun secara lisan kepada dinas/opd terkait atas pengaduan tersebut. Namun untuk tindak lanjut pengaduan tersebut hanya bisa direspon atau ditindaklanjuti oleh dinas/opd terkait. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika hanya memiliki wewenang untuk meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada dinas/opd saja.

TABEL 3.12
RASIO JUMLAH LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT SECARA
ONLINE YANG DITINDAKLANJUTI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BINJAI TAHUN 2023 DAN 2024

NO	APLIKASI	2023			2024		
		JUMLAH PENGADUAN	SUDAH DITINDAK LANJUTI	BELUM DITINDAK LANJUTI	JUMLAH PENGADUAN	SUDAH DITINDAK LANJUTI	BELUM DITINDAK LANJUTI
1	SP4N LAPOR	39	39	0	25	25	0
2	E-MASYARAKAT	76	56	20	37	35	2
TOTAL LAPORAN		115	95	20	62	60	2

Sumber : SP4N Lapor dan E-Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa terjadi penurunan jumlah pengaduan masyarakat baik melalui aplikasi SP4N-LAPOR maupun aplikasi E-MASYARAKAT. Hal tersebut dapat diindikasikan seiring berkurangnya keluhan masyarakat kota Binjai tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Binjai pada Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai kembali mendapat penghargaan menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang paling cepat dalam merespon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR yang di nilai oleh OMBUDSMAN.

Dan Pada Tahun 2024 Binjai juga mendapatkan peringkat I (Pertama) untuk Wilayah Sumatera Utara sebagai pengelola pengaduan masyarakat yang dimonitoring dan di evaluasi oleh Kemenpan RB.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai antara Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

TABEL 3. 13
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI	
			2023	2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi yang terintegrasi	Indeks Nilai SPBE	2,98	3,12
2	Meningkatkan penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD	Persentase Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik	0%	12%
3	Rasio Layanan Informasi yang terpublikasi	Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan	1100	4225
		Persentase data statistik sektoral yang tersusun	0%	30%
4	Meningkatkan layanan masyarakat atas pengaduan secara terpadu	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti	70%	97%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Dari tabel yang ditampilkan di atas, dapat disimpulkan ada peningkatan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, antara 2023 dan 2024.

3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Perbandingan realisasi dan target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 3.14
PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

No .	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisa si 2024	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2024	2024	2025	202 6
1	2	3	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatny a pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, akses dan kualitas layanan public, dan meningkatny a implementas i pengembang an sistem pelaporan dan Capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Titik Hot Spot di Ruang Publik	45	53	55	58	0	62
		Jumlah Informasi Publik Yang Terpublikasi	3346	873	1000	1135	1285	1285
		Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai	55%	30	37,7	50	62,5	75
		Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Berbasis Eelektronik yang Dikelola	19	10	11	12	13	24

		Jumlah ruang publik yang tercover pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK	80%	60%	70%	80%	90%	100 %
		Jumlah peraturan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diselesaikan	3	1	2	3		
		Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik	0,00%	23,81 %	47,62 %	71,43 %	85,71 %	100 %
		Jumlah Layanan Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan	84,32%	50%	60%	70%	80%	90%
		Jumlah informasi yang diupload di website Pemkot Binjai	94,05%	60%	65%	70%	85%	100 %

		Jumlah informasi yang diupload di Website Diskominfo	94,05%	30%	50%	60%	70%	90%
		Jumlah informasi yang diupload di media sosial Pemkot Binjai dan Diskominfo	149,16%	20%	40%	65%	75%	90%
		Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti	82,00%	50%	60%	70%	80%	100 %

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

3.2.4 Status Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dibandingkan dengan Kota Lain

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.663 Tahun 2024, tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai berhasil meningkatkan Indeks SPBE dari 2,98 pada Tahun 2023 menjadi 3,12 pada Tahun 2024, **dengan predikat “BAIK”** .

Tabel 3.15
Indeks dan Predikat Kota Binjai pada Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik se Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,86	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,57	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,66	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,37	Cukup
7	Pemerintah Kab. Dairi	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	2,94	Baik
9	Pemerintah Kab. Dairi	2,67	Baik
10	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,85	Baik
11	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	3,14	Baik
12	Pemerintah Kab. Asahan	2,86	Baik
12	Pemerintah Kab. Nias	3,72	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Toba	2,95	Baik
14	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,89	Baik
15	Pemerintah Kab. Nias Selatan	3,90	Baik
16	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,80	Baik
17	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,66	Baik
18	Pemerintah Kab. Samosir	2,70	Baik

19	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,65	Baik
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,17	Cukup
21	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	2,26	Cukup
22	Pemerintah Kab. Batubara	2,67	Baik
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,93	Cukup
24	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,78	Baik
25	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,80	Kurang
26	Pemerintah Kab. Nias Utara	2,41	Cukup
27	Pemerintah Kota Medan	2,67	Sangat Baik
28	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3,79	Baik
29	Pemerintah Kota Binjai	3,12	Baik
30	Pemerintah Kota Pematang Siantar	3,06	Baik
31	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3,24	Baik
32	Pemerintah Kota Sibolga	2,41	Cukup
33	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2,66	Baik
34	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,33	Cukup

Sumber : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Dari tabel yang ditampilkan diatas, dapat disampaikan bahwa predikat Pemerintah Kota Binjai termasuk yang terbaik diantara Pemerintah Kab/Kota yang ada di Sumatera Utara terkait SPBE yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai. Dimana secara Indeks penilaian Pemerintah Kota Binjai mendapat point yang lebih tinggi dibanding lainnya, yaitu

sebesar 3,12. Jika diurutkan secara indeks terbesar, Pemerintah Kota Binjai menempati 10 (sepuluh) besar,

- b. Untuk Indikator Kinerja Jumlah Layanan informasi Layanan pada Tahun 2024, Kota Binjai menerima penghargaan berupa “Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori Kabupaten/Kota Sebagai Badan Publik ‘INFORMATIF’.



Gambar 1. Penghargaan Anugerah yang diterima Kota Binjai sebagai Badan Publik “Informatif” Tahun 2024

Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diberikan di medan pada tanggal 09 Desember 2024.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

3.2.5.1 Kendala / Hambatan dalam Pencapaian Target.

Kendala/ Hambatan yang dihadapi dalam Sekretariat Daerah Kota Binjai untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, adalah, sebagai berikut :

1. Target Kinerja tersebut mungkin saja telah terealisasi, namun belum dapat tercapainya kinerjanya secara efektif, sehingga ukuran / capaian keberhasilannya hanya sebagian yang dapat diukur.
2. Terbatasnya koordinasi dengan beberapa OPD/Dinas terkait yang berdampak kepada pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.
3. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai pada tiap bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, khususnya pada bidang Statistik dan Persandian yang berakibat belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai sebagai pada Program Statistik dan Persandian.

3.2.5.2 Solusi / Harapan dalam Pencapaian Target.

Solusi / Harapan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Binjai agar tercapai target Sasaran Strategis, perlu dilakukan beberapa kebijakan yang akan diterapkan, sebagai berikut :

1. Memutakhirkan database yang akurat untuk bahan informasi penyelenggaraan budgeting, pemerintahan dan pembangunan.
2. Perekrutan atau penambahan Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.
3. Dengan keterbatasan anggaran diharapkan untuk melakukan skala prioritas didalam pemanfaatan dan penggunaan anggaran.
4. Memberikan kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan memotivasi kerja Aparatur guna meningkatkan Kinerja Aparatur yang berkualitas.
5. Memaksimalkan penggunaan dana yang memadai untuk meningkatkan kualitas kegiatan berbasis kinerja dan berdaya saing.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran per program pada Pemerintah Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEADAAN TAHUN 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.996.931.540	3.678.577.055	92,04%
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.526.370.656	2.317.590.709	91,74%
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.602.173.662	2.547.036.260	97,88%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	142.970.630	36.268.000	25,37%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN SEKTORAL	207.423.100	84.750.188	40,86%
TOTAL		9.475.869.588	8.664.222.212	91,43%

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

$$1 - [(\% \text{realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{capaian kinerja})) \times 100\%]$$

Dengan rata-rata % realisasi anggaran sebesar 91,43% (tabel 3.17) dan Rata-rata % capaian kinerja sebesar 130% maka tingkat efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Binjai adalah:

$$= 1 - [91,43\% \times (1 / 130)] \times 100\%$$

$$= 0,2966$$

3.2.7 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Binjai dapat tercapai karena didukung dengan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pada pemanfaatan pengelolaan anggarannya menentukan skala prioritas yang mendukung pencapaian kinerja Kepala Daerah Pemerintah Kota Binjai.

Kegiatan untuk mendukung Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Binjai untuk menginformasikan serta mempublikasikan terkait kegiatan-kegiatan, kegiatan yang mendukung program tersebut adalah terkait pengelolaan media komunikasi publik, menyediakan informasi publik, Menyediakan layanan media, melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta memberikan penguatan kapasitas pada sumber daya terkait komunikasi publik.

Kegiatan untuk mendukung Program Pengelolaan Aplikasi Informatika adalah dengan mengakomodir kebutuhan Pemerintah Kota Binjai terkait Jaringan terkait Teknologi Informatika, membangun akan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan opd, serta membangun website-website yang dibutuhkan OPD untuk mendukung capaian kinerja Kepala daerah Kota Binjai tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan merupakan Pertanggungjawaban Keuangan yang sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program atau kegiatan untuk memperoleh hasil kinerja.

Sepanjang Tahun 2024 Pemerintah Kota Binjai telah mengalokasikan Belanja Langsung untuk mewujudkan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Binjai sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada Tabel dibawah ini dapat diuraikan Anggaran dan Realisasi yang digunakan pada 4 (lima) Program yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai untuk mewujudkan Sasaran Strategi, sebagai berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Binjai Tahun 2024

URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	%	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.996.931.540	3.678.577.055	92,04%	318.354.485
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.467.477.568,00	2.361.002.046,00	95,68%	106.475.522
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	2.358.277.568,00	2.257.542.046	95,73%	100.735.522
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DAU	109.200.000,00	103.460.000	94,74%	5.740.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87.896.000,00	83.278.742,00	94,75%	4.617.258
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DAU	87.896.000,00	83.278.742	94,75%	4.617.258
Administrasi Umum Perangkat Daerah		844.633.011,00	673.112.155,00	79,69%	171.520.856
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	9.940.050,00	8.970.600	90,25%	969.450
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	116.883.644,00	110.700.000	94,71%	6.183.644
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	121.362.475,00	104.160.330	85,83%	17.202.145
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	142.834.842,00	111.121.800	77,80%	31.713.042
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	72.000.000,00	72.000.000	100,00%	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DAU	48.588.000,00	45.836.000	94,34%	2.752.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	333.024.000,00	220.323.425	66,16%	112.700.575

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		58.987.842,00	58.400.000,00	99,00%	587.842
Pengadaan Mebel	DAU	58.987.842,00	58.400.000	99,00%	587.842
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		323.594.369,00	302.482.176,00	93,48%	21.112.193
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	17.000.000,00	5.000.000	29,41%	12.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	109.723.500,00	101.331.900	92,35%	8.391.600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	196.870.869,00	196.150.276	99,63%	720.593
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		214.342.750,00	200.301.936,00	93,45%	14.040.814
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	119.160.000,00	106.147.224	89,08%	13.012.776
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	37.990.000,00	37.640.000	99,08%	350.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	57.192.750,00	56.514.712	98,81%	678.038
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.526.370.656	2.317.590.709	91,74%	208.779.947
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.526.370.656	2.317.590.709	91,74%	208.779.947
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	DAU	1.022.155.600	935.569.000	91,53%	86.586.600
Pelayanan Informasi Publik	DAU	485.259.300	438.191.413	90,30%	47.067.887
Layanan Hubungan Media	DAU	847.650.000	847.650.000	100,00%	-
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	DAU	171.305.756	96.180.296	56,15%	75.125.460

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	DAU	-	-	0,00%	-
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Rp2.602.173.662	Rp2.547.036.260	97,88%	55.137.402
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		829.901.182,00	825.373.036,00	99,45%	4.528.146
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DAU	28.143.606,00	26.735.460	95,00%	1.408.146
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	DAU	801.757.576,00	798.637.576	99,61%	3.120.000
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.772.272.480,00	1.721.663.224,00	97,14%	50.609.256
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	DAU	698.877.000,00	666.855.000	95,42%	32.022.000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	DAU	762.652.980,00	758.170.392	99,41%	4.482.588
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	DAU	310.742.500,00	296.637.832	95,46%	14.104.668
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		142.970.630,00	36.268.000,00	25,37%	106.702.630
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		142.970.630,00	36.268.000,00	25,37%	106.702.630
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		142.970.630,00	36.268.000	25,37%	106.702.630

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	DAU	53.146.230,00	-	0,00%	53.146.230
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	DAU	89.824.400,00	36.268.000	40,38%	53.556.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		207.423.100,00	84.750.188,00	40,86%	122.672.912
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		207.423.100,00	84.750.188,00	40,86%	122.672.912
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		207.423.100,00	84.750.188,00	40,86%	122.672.912
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DAU	42.232.000,00	38.434.200	91,01%	3.797.800
Pelaksanaan Kemananan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DAU	165.191.100,00	46.315.988	28,04%	118.875.112
JUMLAH		Rp9.475.869.588	Rp8.664.222.212	91,43%	811.647.376

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Per 31 Desember 2024 (SIPD)

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 9,475,869,588 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8,664,222,212 yaitu 91,43% dari total pagu anggaran. Dan ada sisa anggaran sebesar Rp. 811,647,376.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Binjai Tahun 2024 ini disusun untuk menyajikan capaian kinerja yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada tahun terakhir RPJMD Kota Binjai dan Renstra 2021-2026.

Hasil capaian indikator kinerja dan sasaran diharapkan akan semakin baik dan senantiasa dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan yang akan selalu ada.

Sasaran strategis dan target indikator program Dinas Komunikasi dan Informatika Binjai dalam tahun 2024 ada beberapa yang belum tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan pada awal perencanaan kinerja, sebagai berikut:

1. Indikator untuk Indeks SPBE, pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai telah menaikkan Indeks SPBE dari 2,98 menjadi 3,12 dengan predikat **“Baik”**. Pemerintah Kota Binjai masuk termasuk ke dalam 10 (sepuluh) besar untuk Indeks SPBE tertinggi untuk Provinsi Sumatera Utara
2. Indikator Rasio Jumlah Layanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Binjai pada tahun 2024 juga melebihi target yang ditetapkan pada awal periode perencanaan kinerja di Tahun 2024. Dimana pada pencapaiannya sebesar 4225 informasi dengan target 1100 informasi. Jika dibandingkan dengan target renstra pada Tahun 2024 melalui media Website Pemerintah Kota Binjai, Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, Instagram, Facebook, media Cetak, Media Online, media Televisi dan Media Luar Ruang berupa spanduk dan Baliho.

3. Indikator Persentase data statistik sektoral yang tersusun, dalam hal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai juga telah memenuhi targetnya didalam menyusun data statistik sektoral.
4. Indikator Rasio Jumlah layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti, Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat melalui SP4N-Lapor sebesar 100% dan E-MASYARAKAT sebesar 82%, jika dirata-ratakan mencapai 97% dan hal tersebut melebihi target yang ditetapkan pada awal periode kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 97%.

Target indikator program Dinas Komunikasi dan Informatika Binjai dalam tahun 2024 yang belum tercapai dengan baik yaitu :

1. Indikator Rasio Jumlah OPD yang menggunakan Tanda Tangan elektronik yang masih belum dapat terlaksana dengan maksimal, hanya mencapai 12% dari 15% yang ditargettikan pada awal Tahun 2024, hal tersebut terkait sumber daya manusia yang masih belum tersedia terkait persandian serta keterbatasan anggaran yang belum ditampung secara keseluruhan pada Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut atas ketidaktercapaian target diatas , Dinas Komunikasi dan Informatika Binjai telah melakukan upaya-upaya untuk dapat merealisasikan tercapainya target indikator tersebut, antara lain :

1. Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Opd-Opd didalam penggunaan dan pemanfaatan tada tangan elektronik.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 juga telah memberikan kesempatan kepada sumber daya pada Bidang Persandian untuk melakukan pelatihan dan pendidikan Formal terkait persandian dengan tujuan untuk menambah kompetensi dan pengetahuan terkait persandian.
3. memaksimalkan koordinasi antara/bidang/bagian dan *stakeholders* secara komprehensif.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala.
5. Memaksimalkan kegiatan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan.
6. Serta melakukan optimalisasi penggunaan anggaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai selama tahun 2024 tidak lepas dari hambatan maupun permasalahan yang dihadapi sehingga membutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan maupun permasalahan tersebut.

Demikian dokumen Laporan Kinerja ini dibuat dan semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BINJAI**



SOFYAN SYAHPUTRA SIREGAR, S.STP, M.AP
NIP. 19870331 200602 1 001